

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan akar dari segala permasalahan dalam kehidupan. Kemiskinan dapat menimbulkan banyak permasalahan sosial dalam berbagai bidang, seperti kriminalitas, pengangguran, bidang kesehatan, dan lainnya. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan dari individu, kelompok dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang hal ini berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (2021). Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan yang dimiliki dapat menjadi faktor pendorong kemiskinan terjadi. Masyarakat seringkali mengabaikan hal tersebut sehingga tidak adanya perubahan dalam kehidupannya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dalam bukunya Utaminingsih (2020) disebutkan bahwa penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan kritis/kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Kemiskinan kritis/kronis disebabkan oleh sikap, kebiasaan dan perilaku yang tidak produktif, keterbatasan akses pada sumber daya dan keterisolasian serta rendahnya taraf pendidikan, kesehatan, dan terbatasnya akses lapangan kerja. Sedangkan kemiskinan sementara disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman dan terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan pemerintah.

Masih banyaknya masyarakat yang tergolong memiliki tingkat perekonomian yang rendah dengan penghasilan yang belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari saja namun kebutuhan lainnya tidak dapat terpenuhi, seperti kebutuhan untuk pemenuhan biaya kesehatan, membayar sewa rumah, membayar listrik, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat masih tergolong kedalam masyarakat miskin. Menurut Undang-

Undang Nomor 13 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Arfiani (2009) mengemukakan bahwa kemiskinan berarti mampu bekerja atau berusaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Selain itu, menurut Sukes (2015) mengemukakan bahwa masyarakat miskin merupakan suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi rentan, tak berdaya, terisolasi dan tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam masalah ini masih banyak dialami oleh kaum perempuan dan menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya secara layak.

Rendahnya kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi kehidupan sehari-hari serta hubungan dengan anggota masyarakat lain dapat berdampak pada kemiskinan sehingga masyarakat belum dapat sejahtera. Peningkatan taraf hidup penting untuk dilakukan agar dapat mencapai kesejahteraan sosial. Sejalan dengan hal tersebut menurut Rustanto (2015) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen untuk dapat mencapai kesejahteraan sosial, yaitu masalah-masalah sosial dapat diatur juga dibuat pemecahan masalahnya, kebutuhan-kebutuhan sosial dapat dipenuhi, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diselesaikan. Berdasarkan ketiga elemen tersebut dapat dilihat bahwa keberhasilan dari kesejahteraan sosial sangat bergantung pada masyarakatnya dan dengan adanya unsur pendukung lain seperti pemerintah yang dapat membantu untuk mewujudkannya.

Setiap individu, kelompok dan keluarga dalam masyarakat tentunya memiliki harapan dan keinginan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar dapat menciptakan perubahan. Menurut Suyono (2004) dalam bukunya Marzuki (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pengembangan manusia

agar memiliki kapasitas penuh, memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat dan lebih makmur. Masyarakat merupakan obyek atau sasaran dari pemberdayaan. Dalam pemberdayaan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar dapat membangun sinergitas antara masyarakat dan pihak lainnya yang bersangkutan seperti pemerintah. Partisipasi masyarakat termasuk didalamnya kaum perempuan berperan penting untuk dapat menunjang keberhasilan program pemberdayaan. Terutama kaum perempuan yang rentan terhadap akibat dari adanya masalah sosial, seperti kekerasan, pelecehan, kriminalitas, kemiskinan, dan lainnya. Pemberdayaan dapat memberikan dampak yang baik pada perubahan kualitas diri, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Winarni (1998) dalam bukunya Bhinadi (2017) mengemukakan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kaum perempuan menjadi sasaran yang penting dalam pemberdayaan, dimana perempuan butuh untuk dapat berdaya. Perekonomian keluarga yang masih belum stabil dan belum terpenuhinya kebutuhan baik itu kebutuhan dasar ataupun kebutuhan lainnya menjadi penyebab perempuan harus ikut andil dalam menanggung ataupun membantu perekonomian keluarga. Menurut Karwati (2020) mengemukakan bahwa berbagai alasan yang melatarbelakangi seorang perempuan dalam berperan diberbagai bidang kehidupan antara lain yaitu karena faktor ekonomi, adanya kesempatan yang diberikan oleh keluarga untuk menuntut ilmu sehingga memiliki keahlian yang memungkinkan untuk mengembangkan kariernya, serta karena kesadaran diri untuk mengembangkan diri dan karier. Selain itu, menurut Rofi'i (2010) mengemukakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, kondisi suatu keluarga mempunyai arti yang penting dalam proses pemberdayaan. Dalam tingkatan tertentu kondisi keluarga dapat menjadi barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan

tentunya sebagai upaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi target utama untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu upaya untuk memberikan daya (*empowering*) kepada para perempuan. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Rini (2019) mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan perempuan lebih ditekankan pada keinginan atau tuntutan membagi kekuasaan, representasi, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan perempuan merupakan penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan, pembinaan, pendampingan, pelatihan dan keterampilan yang dapat memberikan perubahan kepada para perempuan. Menurut Karwati (2017) mengemukakan bahwa potensi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat masih belum mendapat porsi yang wajar. Hal ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah mengingat kaum perempuan dari sisi kuantitas menempati urutan pertama dari komposisi warga masyarakat. Perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, namun dalam bidang pendidikan dan ekonomi, banyak perempuan Indonesia yang tidak memiliki kemampuan memperoleh peluang kerja karena keterbatasan atau tidak bisa mengolah potensi yang ada pada dirinya maka perlunya pemberdayaan perempuan.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi salah satu faktor pendorong perempuan kurang berdaya sehingga dapat menimbulkan masalah sosial. Menurut BPS (2021) mengemukakan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ciamis adalah 7,9 tahun. Adapun indeks pendidikan di Kabupaten Ciamis yaitu 57,71 dengan persentase pendidikan perempuan usia 16-18 tahun sebesar 14,20%. Dengan demikian rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas hidup perempuan menjadi salah satu pemicu berbagai permasalahan sosial di Jawa Barat. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Simfoni Kemen PPA RI (2021) tercatat sebanyak 1.634 kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Barat dengan persentase kekerasan terhadap perempuan diperkirakan sekitar 90,56 % dengan hampir 60% kejadian kekerasan terjadi di lingkup rumah tangga. Dengan demikian, maka banyak perempuan yang menjadi korban dari perceraian dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan membentuk sebuah program pemberdayaan yang dibuat oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Ada banyak program pemberdayaan perempuan yang dibentuk lembaga pemerintah, salah satunya adalah program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Program tersebut dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di masa lalu seperti terjadinya peperangan yang menyebabkan para perempuan menjadi korban ditinggal mati oleh suami serta karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian sehingga perempuan menjadi janda. Pada setiap wilayah terdapat para perempuan yang menjadi penanggung jawab ekonomi keluarganya atau sebagai kepala keluarga, baik itu perempuan korban perceraian atau *single parent* ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Menurut BPS (2000) dalam bukunya Hubies (2010) mengemukakan bahwa sebanyak 13,4 % atau 6 juta rumah tangga di Indonesia adalah keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut BPS (2020) mengatakan bahwa jumlah perempuan kepala keluarga di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 65.118 kepala keluarga perempuan. Maka dari

itu dibentuklah program Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang merupakan program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis pada bidang Pemberdayaan Perempuan. Program Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dibentuk berdasarkan dari kebutuhan masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan keprihatinan terhadap perempuan yang menjadi kepala keluarga. Program tersebut bertujuan untuk dapat memberikan perubahan bagi para perempuan baik itu perubahan pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perekonomian untuk dapat mencapai kemandirian serta kesejahteraan.

Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis merupakan salah satu lokasi yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Menurut BPS (2019) mengatakan bahwa terdapat sebanyak 41.356 jiwa terdiri dari 20.335 laki-laki dan 21.201 perempuan. Dapat terlihat dari data tersebut bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan. Sesuai dengan data tersebut maka dibentuk program kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang bernama kelompok “Rasa Katineung”. Pada lokasi tersebut terdapat permasalahan yang menjadi latar belakang program PEKKA, diantaranya tingginya persentase kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat, rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Ciamis, terdapat perempuan kepala keluarga sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga di Kabupaten Ciamis, dan populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Sehingga program PEKKA diselenggarakan di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk dapat mendorong para perempuan agar mampu untuk berdaya serta mandiri.

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis sebagai fasilitator dalam setiap pembinaan yang dilakukan dan juga bekerja sama dengan Desa Bangunharja sebagai fasilitator serta pendamping lapangan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Melalui program ini, para perempuan mendapatkan

pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan keterampilan melalui pembuatan makanan ringan dan dalam berwirausaha. Dengan adanya program pemberdayaan ini menjadikan para perempuan kepala keluarga untuk dapat lebih mandiri sehingga dapat membantu perekonomian keluarga yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi diantaranya:

- 1.2.1 Tingginya persentase kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat.
- 1.2.2 Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Ciamis.
- 1.2.3 Terdapat perempuan kepala keluarga sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga di Kabupaten Ciamis.
- 1.2.4 Populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah maka didapatkan rumusan masalah yaitu Bagaimana proses Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

5.1.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam pendidikan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat.

- b. Untuk dapat menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai program pemberdayaan melalui program Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai informasi untuk dapat diterapkan dalam program pemberdayaan perempuan.
- b. Bagi masyarakat Desa Bangunharja, penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan meningkatkan kemandirian dalam upaya pengembangan ekonomi.
- c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan di desa khususnya pada pemberdayaan perempuan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah atau variabel di dalam skripsi ini. Sesuai dengan judul peneliti yaitu “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan (Studi pada Kelompok Perempuan Kepala Keluarga Rasa Katineung Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.6.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan daya kepada masyarakat untuk dapat merubah kehidupannya dalam berbagai aspek kehidupan untuk mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan memiliki tahapan-tahapan yang penting untuk dilakukan, dari mulai perencanaan hingga pada evaluasi untuk dapat melihat progres dari proses pemberdayaan yang dilakukan. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh siapa pun, dimana pun, dan kapan pun. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh kelompok atau komunitas, pemerintah, dan lain sebagainya. Masyarakat merupakan obyek atau sasaran dari pemberdayaan, namun tidak menutup kemungkinan juga masyarakat menjadi

subyek atau sebagai yang ikut serta berpartisipasi selama proses pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan perempuan sebagai bentuk pemberian daya kepada masyarakat khususnya perempuan yang lebih rentan dalam upaya merubah kehidupannya sehingga menjadi lebih baik, sebagai upaya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada, untuk dapat meningkatkan kualitas diri, dan sebagai upaya untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Pemberdayaan perempuan penting untuk dilakukan agar perempuan dapat lebih berkembang dan mampu untuk lebih baik dalam segala hal.

1.6.2 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan sebuah program pemberdayaan perempuan yang dibentuk untuk memberikan keberdayaan bagi para perempuan khususnya pada perempuan yang menjadi tanggungan keluarganya, perempuan korban perceraian, *single parent*, dan perempuan yang ingin membantu perekonomian keluarganya. Dengan adanya kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dapat memberikan kemudahan bagi para perempuan untuk mendapatkan ilmu, pelatihan dan keterampilan sebagai upaya untuk dapat memberikan perubahan.

1.6.3 Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan

Kegiatan pembuatan makanan ringan merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan keterampilan pada para perempuan kepala keluarga yang akan memberikan perubahan pada dirinya dan pada ekonomi keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara dengan meningkatkan kualitas diri yang dapat dilakukan melalui memberikan pelatihan dan pembinaan pada anggota perempuan kepala keluarga agar mampu untuk berdaya dan mandiri dalam hal memiliki bekal pengetahuan, keahlian dalam membuat olahan makanan ringan hingga dalam berwirausaha sebagai upaya untuk memperoleh hasil dari produk yang telah dibuat sehingga dapat menghasilkan dan memiliki nilai jual. Dalam hal ini dilakukan oleh para perempuan yang ingin membantu perekonomian keluarganya atau perempuan yang memang menjadi tanggungan bagi keluarganya.

